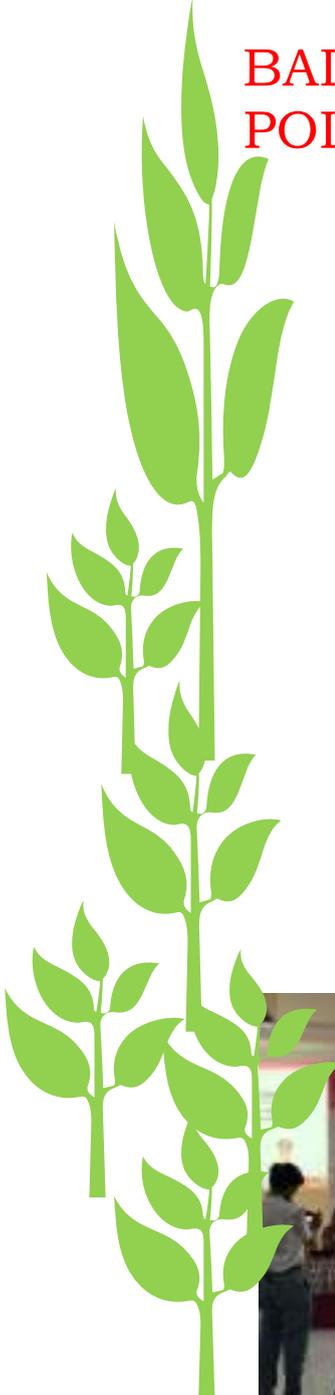


LKJIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN JEPARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP – PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan tepat waktu

Penyampaian LKjIP - PD Tahun 2024 kepada Pemerintah pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun 2024, berdasarkan tolak ukur kinerja yang disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian gambaran kinerja PD tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan diharapkan dapat menyajikan dengan baik secara transparan dan akuntabel guna terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan pelaporan kinerja termasuk pelaksanaan tugas ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini kami ucapkan terima kasih serta dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya sebagaimana mestinya.

Jepara, 31 Januari 2025

Plt Kepala Bakesbangpol

Kabupaten Jepara



BUDI PRISULISTYONO.S.Si,M,Si

Pembina Tk, I

NIP. 199700606 199703 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara merupakan unsur pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan politik dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Tahun 2023 merupakan periode ketiga implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, Dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP-PD) Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana dokumen pernyataan kinerja, diukur berdasarkan 2 (*dua*) Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan didukung dalam pelaksanaan 6 (*enam*) Program Strategis, dengan realisasi kinerja capaian sasaran secara komulatif sebesar 113 % sudah sesuai dengan target yang di rencanakan yang mempunyai makna **Sangat Baik**. Sedangkan ditinjau dari *akuntabilitas keuangan yang* didukung dengan anggaran sebesar Rp. 41.321.145.662,- bahwa *capaian kinerja sasaran strategis (komulatif)* berdasarkan *realisasi anggaran* per 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp. 41.028.262.633,- atau 99,% yang mempunyai makna **Baik**.

Total pagu anggaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 43.976.070.662 dengan *realisasi keuangan secara keseluruhan* adalah sebesar Rp. 43.051.271.674,- atau 97 % yang mempunyai makna **Baik**.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan realisasi anggaran tahun 2024 tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Hal ini terbukti dengan kondusifnya stabilitas keamanan daerah di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Jepara.

Secara umum berbagai kendala yang masih dihadapi dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja dalam pelaksanaan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara adalah masih adanya perencanaan kegiatan belum secara optimal melaksanakan atau mendukung program/kegiatan strategis PD, sehingga dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan dilakukan suatu kebijakan melakukan pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan untuk mengakomodir adanya perubahan asumsi dari asumsi awal rencana kerja. Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara secara berkelanjutan, diharapkan ke depan dapat melaksanakan semua sasaran strategis serta program/kegiatan strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini akan sangat bermanfaat bagi internal organisasi maupun eksternal organisasi yang membutuhkan. Bagi Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dan jajarannya, laporan ini agar dapat digunakan sebagai sarana belajar atau motivasi untuk proses perbaikan secara kontinyu, khususnya terhadap program dan kegiatan prioritas di masa mendatang.

Jepara, 31 Januari 2025

Plt Kepala Bakesbangpol
Kabupaten Jepara



BUDI PRISULISTYONO.S.Si,M,Si

Pembina Tk, I

NIP. 199700606 199703 1 008

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. FUNGSI STRATEGIS SKPD	6
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PD	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA	13
B. REALISASI KINERJA ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	23
A. KESIMPULAN	23
B. REKOMENDASI.....	24

LAMPIRAN :

Lampiran 1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Tuntutan publik menghendaki agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tiga prinsip yang mendasarinya, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah yang *akuntable* merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat Kabupaten Jepara guna mencapai masa depan yang lebih baik agar bisa setara dengan masyarakat lainnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Jepara dapat berlangsung dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang berkesinambungan.

Sebagai satuan kerja yang mendukung program kerja Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa serta politik dalam negeri.



A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jepara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diuraikan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara mempunyai Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual , membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Sub koordinator , yaitu :



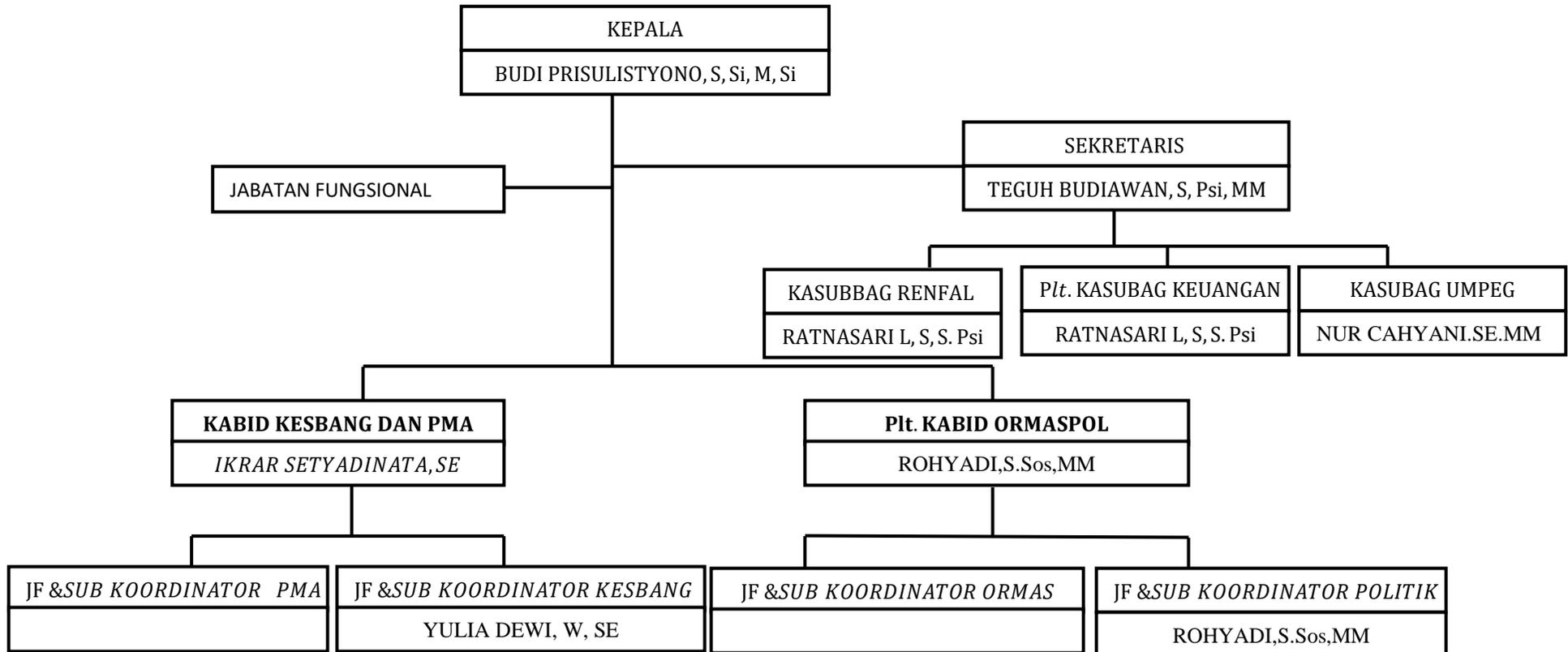
- a. JF & Sub Koordinator Penanganan Masalah Aktua
- b. JF & Sub Koordinator Kesatuan Bangsa
4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan , membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Sub koordinator, yaitu :
 - a. JF & Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
 - b. JF & Sub Koordinator Politik

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. sebagai berikut:



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara





Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.2.
Gambaran Umum Dukungan Personil PNS Berdasarkan Jumlah Personil, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan PNS Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2023

JUMLAH PERSONIL PNS (ORANG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		KEPANGKATAN		GOLONGAN	
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT	JUMLAH PERSONIL (ORG)	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	S2	1	Pembina Tk.I	1	IV/b	2
	S2	1	Pembina	1	IV/a	1
	S1	4	Penata Tk. I	4	III/d	4
	SMA	1	Penata Tk. I	1	III/d	1
	S2	1	Penata Tk I	1	III/d	1
	S1	1	Penata	1	III/c	1
	S1	1	Penata Muda Tk I	1	III/b	1
	S1	1	Penata Muda	1	III/a	1
	D3	1	Penata Muda Tk.I	1	III/b	1
	SLTA/ Sederaja	1	Pengatur	1	II/c	1
	-	1	Pengatur Muda	1	II/b	1
	SD	-	Juru	1	I/c	1

Sumber : Bagaian Kepegawaian pada Bakesbangpol Jepara



Tabel 1.3.
Gambaran Umum Dukungan Personil PNS Berdasarkan
Komposisi Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

JUMLAH JABATAN STRUKTURAL TERSEDIA					JUMLAH JABATAN STRUKTURAL TERSEDIA			PEJABAT	
KEPALA (JML)	SEKRE- TARIS (JML)	SUB. BAGIAN (JML)	BIDANG (JML)	JF pada SUB. BIDANG (JML)	ESELON II (ORG)	ESELON III (ORG)	ESELON IV (ORG)	STRUK- TURAL (ORG)	FUNGSI- ONAL (ORG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	3	2	4	1	2	3	6	4
Tersedia 11 Jabatan Struktural					Terisi 6 Jabatan Struktural			6	4

Sementara untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara didukung sarana dan prasarana yang terdiri dari :

- 1) Tanah dan Bangunan Kantor (4 unit), terdiri dari :
 - Gedung Kantor Sekretariat (1 unit);
 - Gedung Aula Kantor /Ormaspol (1 unit);
 - Gedung /Rumah Dinas Sosial yang di ahli fungsikan/digunakan untuk Bidang PMA (1 unit);
 - Gedung Omah Jagong di Jalan Kartini No 1 Jepara di gunakan untuk sarana masyarakat dalam lapor temu cepat dalam mewujudkan keharmonisan serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat (1 unit);.
- 2). Kendaraan Bermotor
 - Roda 7 (tujuh) : 1 unit Mobil Jabatan Esselon II
4 unit Mobil Operasional dibidang bidang
2 unit Mobil Operasional Untuk Ormas
 - Roda 2 (dua) : 8 unit Operasional
1 unit Operasional Untuk Ormas MUI



B. FUNGSI STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara secara umum memiliki fungsi strategis, yaitu perumusan penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Kebhinekaan sebagai tatanan perilaku hidup berbangsa dan bernegara di daerah.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara yang harus diselesaikan dan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan di Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Permasalahan Paling Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c. Belum optimalnya pelayanan yang berinovatif;
2. Permasalahan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan BAPPEDA untuk dilakukan penyesuaian/perubahan indikator kinerja pada dokumen perencanaan.
 - b. Memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah diformalkan dan telah ditetapkan dengan SK penetapan oleh kepala OPD.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan BAPPEDA untuk perubahan target kinerja pada dokumen perencanaan agar lebih realistis dan menantang.



- d. Memperbaiki penyusunan Diagram Crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit kerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.
- e. Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi.;
- f. Menyusun dan menetapkan SOP petunjuk teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
- g. Mendokumentasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi mulai dari tingkat sub bagian/seksi sampai dengan tingkat OPD;
- h. LKJiP agar memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan data realisasi capaian nasional;
- i. Mengunggah laporan kinerja pada laman website OPD tepat waktu sesuai ketentuan

D. SISTEMATIKA PENULISAN LkjIP

Sitematika penulisan LKJjiP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- a. Gambaran Umum PD
- b. Permasalahan Utama
- c. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan dan Perjanjina Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Capaian Kinerja Program
- c. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran – Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Recana Stategis kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Kabupaten Jepara karena masa jabatan Bupatinya berakhir Tahun 2022, dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 maka tidak mempunyai visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rencana pembangunan berdasarkan arah pembangun dalam dokumen RPD 2013 – 2026

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Sasaran yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan pembangunan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya
2. Meningkatnya kualitas pelayanan PD

Dengan ini kami sajikan data rencana kerja yang harus di capai pada organisasi badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kurun waktu 2023 sampai degan 2026 pada tabel berikut ini

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja Jangka Menengah sebagaimana yang termuat dan tercantum dalam RENSTRA Perangkat Daerah Periode 2023-2026 setelah Perubahan RENSTRA PD.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			
			2023	2024	2025	2026
<i>Meningkatkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya</i>	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	75	75	80	90
Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	81,95	82.00	82,50	83.00
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	86	87	88	89



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai indikator kinerja yang harus dicapai

Adapun perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024, dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini,

**Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Prosentase (100%)	100
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	Prosentase (100%)	75.5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	Nilai SKM	82
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Prosentase (100%)	87

**Tabel 2.3
Tabel Program/Kegiatan**

NO	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	0.17 %	435.000.000



LKjIP - PD TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

NO	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0.09 %	39.284.767.050
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase ormas yang mendapatkan pembinaan	50%	179.200.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda dan masyarakat	15 %	25.000.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Berhasil (100%)	735.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi kantor	100 %	662.178.612



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara secara substansial adalah wujud pertanggungjawaban akan suatu keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang di amanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang disusun secara priodik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jepara pada Tahun 2023, capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik atau rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	≥ 100 %	Sangat Baik
2.	≥ 75 % s/d 100 %	Baik
3.	≥ 65 % s/d 75 %	Cukup Baik
4.	≥ 50% s/d 65 %	Kurang



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara mempunyai dua indikator kinerja sasaran yang diselesaikan pada tahun 2024 dengan target dan realisasi kinerja , dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.1
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Katogori
1	Meningkatnya ketahanan idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100	100	Baik
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	75	100	133	Sangat baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	82	86.82	105	Sangat baik
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	87	100	115	Sangat baik
	Rata rata realisasi capaian kinerja				113 %	

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara selama tahun 2024 dengan dua sasaran kinerja dan 4 indikator kinerja dengan rata rata katogori sangat baik, itu adanya kerjasama dan kolaborasi antar program dan kegiatan dalam mendukung sasaran kinerja sejalan dengan strategi dalam perencanaan untuk menyelesaikan sasaran kinerja utama yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 dengan tahun 2023 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara rata rata dengan capaian kinerja katogari sangat baik belum adanya terjadi penurunan realisasi kinerjanya , namu dari 2 sasaran kinerja dan 4 indikator kinerja satu sasaran kinerja yaitu



Sasaran kinerja I Meningkatnya ketahanan idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator yang pertama Persentase potensi konflik sosial yang tertangani dengan realisasi capaian dari tahun ke tahun nilai 100 % yaitu dapat diartikan bahwa potensi konflik yang ada di kabupaten Jepara tertangani dengan terselesaikan dengan baik walaupun tidak mengalami kenaikan realisasi capaian kinerja nya , dengan di sajikan tabel jumlah konflik yang tertangani

NO	Jenis Konflik	2023	2024
1	Bidang Idiologi	-	
2	Bidang Politik		
3	Bidang Ekonomi	2	2
4	Bidang Sosial Budaya	2	2

Dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran kedua persentase masyarakat yang paham idiologi dan karakter kebangsaan target realisasi kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 100 % dari target 75 % dengan capaian kinerja sasaran 133 % masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan sejumlah 3.250 orang , Meskipun capaian kinerja 133% menunjukkan keberhasilan yang signifikan, terdapat beberapa faktor penghambat yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan. Antara lain

1. Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

a. Minat dan Kesadaran yang Beragam:

- Tidak semua masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang sama terhadap pentingnya wawasan kebangsaan, sehingga diperlukan strategi pendekatan yang lebih menarik.

b. Kesibukan Masyarakat:

- Faktor ekonomi dan pekerjaan membuat beberapa kelompok masyarakat sulit untuk mengikuti program pembinaan, terutama bagi pekerja harian dan masyarakat di sektor inform

2. Perubahan Dinamika Sosial dan Politik

a. Hoaks dan Disinformasi:

- Masyarakat semakin terpapar informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial yang sering menyebarkan hoaks dan propaganda yang dapat mengaburkan pemahaman kebangsaan.

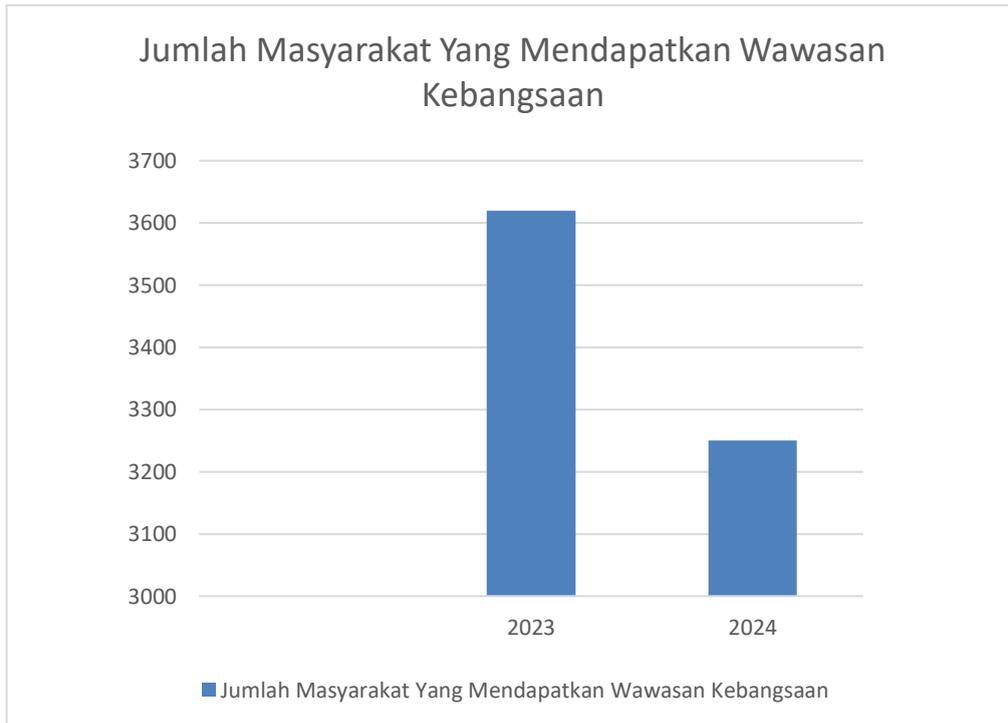


b. Polarisasi Sosial:

- Perbedaan pandangan politik, suku, dan agama terkadang menjadi tantangan dalam membangun pemahaman bersama tentang wawasan kebangsaan.

Diagram

Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



Sedangkan capaian kinerja sasaran II yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan PD dengan indikator kinerja Nilai SKM PD pada tahun 2024 realisasi sasaran kinerja 105 % dan Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target realisasi kinerja sebesar 100 % , pada sasaran ke dua kinerja kali ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari target yang di rencanakan sehingga indikator kualitas pelayanan dengan capaian kinerja kategori sangat baik yang mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan secara nyata dalam melayani masyarakat dalam kurun waktu 2 tahun mengalami kenaikan pada realisasi capaian kerjanya, dengan ini dapat disajikan Tabel Perbandingan Capaian Kinerja, dibawah ini :



Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	202n-1			202n		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	75	75	100	75	100	133
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	81,95	87,31	107	82	86,82	105
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	86	83	96	87	100	115

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Dokumen Renstra

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Kondisi Akhir Resntra
1	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	100
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	100	133
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	86,82	87
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100	115



2. Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan /Penurunan Kinerja

- a. Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Sasaran 1” Meningkatkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya”
 1. Pemantapan nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat telah dilaksanakan berkala sebanyak 10 kali
 2. Dialog Kebangsaan pada pelajar dan mahasiswa sebanyak 4 kali
 3. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kondusifitas daerah 3 kali
 4. Koordinasi dengan organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama sebanyak 2 kali
 5. Optimalisasi kegiatan P4GN di tingkat pelajar sebanyak 10 kali
 6. Optimalisasi pendidikan politik dimasyarakat dan pelajar sebanyak
 7. Koordinasi dan kerjasama dengan partai politik dalam peningkatan pengetahuan demokrasi kepada kader kadr partai politik 2 kali pelatihan Lpj banpol
 8. Optimalisasi dan kerjasama dengan forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka upaya menjaga ketahanan bangsa sebanyak 4 kali kegiatan apel tiga pilar .
- b. Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 2 ” Meningkatkan kualitas pelayanan Pearangkat daerah ” antara lain
 1. Perencanaan kinerja dan Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga keselarasan anatar program dan kegiatan dengan melaksanakan Rakor 1 kali penyusunan Renstra
 2. Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keungan dan fisik tepat waktu dengan melaksanakan laporan evaluasi tiap triwulan
 3. Pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan pada saat rapat koordinasi rutin yang dilakukan tiap 1 bulan sekali
 4. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan yang dilakukan tiap satu bulan sekali
 5. Pemberian reward and punishment berupa apresiasi atau arahan kepada pengampu kegiatan pada saat rapat koordinasi yang di lakukan pada saat laporan evaluasi tahunan 1 tahun anggaran sekali



3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Urusan Kesatuan Besatuan bangsa dan Politik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu negara. Dalam upaya mempertahankan persatuan, berbagai sumber daya—baik finansial, manusia, maupun teknologi—harus dikelola dengan efisien agar dapat memberikan hasil yang optimal. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya koordinasi sering kali menghambat efektivitas strategi pemersatu bangsa.

Salah satu aspek penting dalam efisiensi penggunaan sumber daya adalah alokasi anggaran yang tepat sasaran. Pemerintah menggelontorkan dana untuk berbagai program kegiatan urusan kebangsaan, seperti pendidikan multikultural, pembinaan ideologi, dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Namun, sering kali terjadi duplikasi program akibat minimnya koordinasi antar-lembaga, yang menyebabkan pemborosan anggaran tanpa dampak yang maksimal. Selain itu, sumber daya manusia juga memegang peran krusial dalam menjaga kesatuan bangsa. Aparat keamanan, tenaga pendidik, serta tokoh masyarakat berperan dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan. Namun, distribusi SDM yang tidak merata masih menjadi tantangan

Pemanfaatan teknologi juga berkontribusi dalam efisiensi upaya menjaga kesatuan bangsa. Digitalisasi informasi memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mendeteksi serta menangani potensi konflik lebih cepat, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Sayangnya, regulasi yang kurang ketat dan literasi digital yang belum merata menyebabkan pemanfaatan teknologi masih belum sepenuhnya optimal. Upaya peningkatan literasi digital serta kerja sama dengan platform digital dalam menangkal disinformasi menjadi langkah strategis yang perlu dikedepankan. Dengan memastikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun teknologi, maka upaya menjaga kesatuan bangsa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada demi terciptanya bangsa yang solid, harmonis, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global. Dengan ini disajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penyacapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah



LKjIP - PD TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	100	100	100	40.658.967.050	40.379.174.024	99	Efisiensi (1%)
		75	133	133				
	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	82			662.178.612	649.088.609	98	Efisiensi (2%)
		87	115	115				
Rata rata caoaian kinerja sasaran				120	41.321.145.662	41.028.262.633	99	

4. Analisis Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Peningkatan /Penurunan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dengan ini kami sajikan data analisa program penunjang sasaran dengan 2 sasaran kinerja dan 6 program kegiatan urusan kesataun bangsa dan politik sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang tidak menunjang
1	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas DanFasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	100	Menunjang
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Prosentasse masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	622	Menunjang



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjukkan tidak menunjukkan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda dan masyarakat	113	Menunjukkan
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase ormas yang mendapatkan pembinaan	100	Menunjukkan
		Persentase masyarakat yang pahan ideologi dan karakter kebangsaan	133	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	176	Menunjukkan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan adminitrasi kantor	100	Menunjukkan
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	115				Menunjukkan

Untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan menjaga dan mempertahankan kesatuan bangsa, program/kegiatan yang mengalami penurunan kinerja perlu optimalisasi melalui koordinasi lebih baik, penyesuaian anggaran yang proporsional, serta pemanfaatan teknologi. Sebaliknya, program yang sudah menunjukkan peningkatan harus terus didukung agar dampaknya semakin luas dan efektif.



Dokumen Kegiatan



Koordinasi dengan Masyarakat, Ormas dalam Memelihara, Ketentraman Kerukunan Umat Beragama



Deklarasi Pemilu Damai dalam Kebebasan Dalam Menggunakan Hak Pilih

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dalam peningkatan kinerja, maka pada tahun 2024 didukung pagu anggaran sebesar Rp. 41.321.145.662 dengan realisasi sebesar Rp. 41.028.262.633 atau 99 % yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	435.000.000	434.590.591	99
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	39.284.767.050	39.118.679.911	99
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	179.200.000	175.585.583	98
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25.000.000	24.721.000	99
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	735.000.000	625.696.939	85
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	662.178.612	649.088.609	98
	Rata Rata	41.321.145.662	41.028.262.633	99



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi berbasis digitalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik dan bertanggungjawab melalui kinerja yang berkualitas tinggi.

Dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara melaksanakan 2 sasaran kinerja dengan capaian Kinerja Sasaran Strategis (*komulatif*) tahun 2024 pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara tercapai 113 % yang mempunyai makna **Sangat Baik**. Sedangkan ditinjau dari akuntabilitas keuangan bahwa capaian kinerja sasaran strategis (*komulatif*) berdasarkan *Realisasi Anggaran* pada akhir tahun anggaran 2024 (*Desember 2024*) tercapai 99 % yang mempunyai makna **Baik**.



Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara telah diupayakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti halnya masalah pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan untuk mengakomodir adanya perubahan asumsi dari asumsi awal rencana kerja yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi.

Begitu juga pada sektor Pelayanan Publik yang dirasakan belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Jepara dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara adalah masih kurangnya ketertiban unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, misalnya belum tepatnya perumusan dari jabaran kelengkapan dari instrument SAKIP. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkapabilitas tinggi.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas segera diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Maka dirumuskan beberapa saran- saran atau Rekomendasi sebagai berikut :



LKjIP - PD TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

1. Perlu dilakukan suatau kajian dalam perencanaan program/kegiatan yang tepat sasaran dan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, sehingga diharapkan kedepannya tidak terdapat lagi program/kegiatan yang tidak dilaksanakan yang keseluruhannya akan mempengaruhi hasil pengukuran kinerja PD;
2. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari staf sampai kepada pimpinan akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasilguna;
3. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;

Diharapkan agar seluruh masukan dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik, supaya tidak menjadi rutinitas formal semata, namun dapat diberikan timbal balik yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dimasa sekarang dan yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini dapat tersusun dan disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Plt.Kepala Bakesbangpol
Kabupaten Jepara



BUDI PRISULISTYONO.S.Si,M,Si

Pembina Tk, I

NIP. 199700606 199703 1 008



LKjIP - PD TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

Lampiran Perjanjian Kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Bolo Putih Nomor 7 Demaan, Jepara
Telepon (0291) 593813, Kode Pos 59419

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI PRISULISTYONO,S,S.I.,M.Si.**
Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEPARA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA,ATD,SH,M.M.**
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

**PIHAK PERTAMA
Pit.KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

BUDI PRISULISTYONO,S,S.I.,M.Si.

Pembina TK.I

NIP.19700606 199703 1 008



EDY SUPRIYANTA,ATD,SH,M.M.

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Presentase potensi konflik sosial yang tertangani Presentase masyarakat yang paham ideologi dan karakter kebangsaan	100 % 75 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Nilai SKM PD	82
		Presentase capaian kinerja PD yang mencapai target	87 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 662.178.612.-	Sumber Anggaran dari APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 435.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 39.284.767.050.-	Sumber Anggaran dari APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 179.200.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 25.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 735.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD

Jejara, 25 Oktober 2024



EDY SUPRIYANTO, A.TD, SH, M.M.

PIHAK PERTAMA
 PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN JEPARA

BUDI PRISULISTYONO, S.S.I., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP.19700606 199703 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Boto Putih Nomor 7 Demaan, Jepara
Telepon (0291) 593813, Kode Pos 59419

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEGUH BUDI AWAN, S.Psi.MM.**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI PRISULISTIYONO, S.Si.M.Si**

Jabatan : **PILKEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
PIL. KEPALA BAKESBANGPOL
KAB. JEPARA

BUDI PRISULISTIYONO, S.Si.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700606 199703 1 006

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS


TEGUH BUDI AWAN, S.Psi.MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730422 199903 1 001

PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA
KABUPATEN JEPARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi kantor	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	10 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	12 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi BMD yang tersusun	12 dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	4 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 662.178.612	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 29.900.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.830.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 1.200.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.000.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 161.893.612	SUMBER ANGGARAN DARI APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 61.200.000.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 319.155.000.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77.000.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS


TEGUH BUDIAWAN, S.Ps.I.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197304221999031001



BUDI PRISULISTIYONO, S.Si.M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19700606 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Boto Putih Nomor 7 Demaan, Jepara
Telepon (0291) 593813, Kode Pos 59419

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROHYADI, S.Sos., M.M.**
Jabatan : **PIL. KEPALA BIDANG ORMASPOL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA**

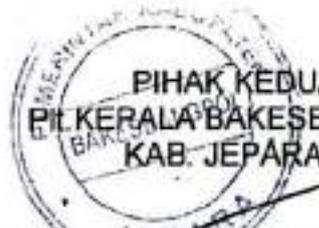
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si**
Jabatan : **PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA**

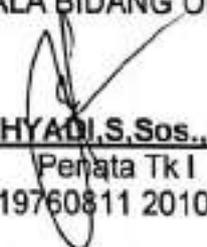
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai LAMPIRAN PERJANJIAN ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jepara, 25 Oktober 2024


PIHAK KEDUA
PIL. KEPALA BAKESBANGPOL
KAB. JEPARA

BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710111 199803 1 013

PIHAK PERTAMA
PIL. KEPALA BIDANG ORMASPOL

ROHYADI, S.Sos., MM
Penata Tk I
NIP. 19760811 201001 1 005

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 Ptl. KEPALA BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN POLITIK
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA**

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Program Peningkatan Peran Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0.09 %
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 laporan
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	800 Orang

II	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase ormas yang mendapatkan pembinaan	50 %
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang tersusun	36 laporan
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1480 Orang
B	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 laporan

III	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda dan masyarakat	15 %
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tersusun	10 laporan
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pnggayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pnggayat Kepercayaan di Daerah	5000 orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Peran Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 39.284.767.050.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 39.284.767.050.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 39.284.767.050.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
II	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 179.200.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 179.200.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
A.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 160.440.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
B.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 18.760.000	SUMBER ANGGARAN DARI APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
III.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 25.000.000.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 25.000.000.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penggayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 25.000.000.-	SUMBER ANGGARAN DARI APBD



PIHAK KEDUA
 Ptl. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN JEPARA.

BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710111 199803 1 013

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
 Ptl. KEPALA BIDANG ORMASPOL.

ROHYADIAS, Sos, MM
 Penata TK. I

NIP. 19760811 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Boto Putih Nomor 7 Demaan, Jepara
Telepon (0291) 593813, Kode Pos 59419

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKRAR SETYA DINATA, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PMA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si

Jabatan : PIt. KEPALA BAKESBANGPOL KAB. JEPARA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700606 199703 1 006

Jepara, 25 Oktober 2024

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KESBANG
DAN PMA**

IKRAR SETYA DINATA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19771028 200604 1 018

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PENANGANAN MASALAH AKTUAL
PADA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Berhasil (100 %)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	10 laporan
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715 orang
B	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125 laporan

C	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	0,17 %
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 735.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 735.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
A	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 220.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
B	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Rp. 30.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
C	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 485.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 435.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 435.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD

Jejara, 25 Oktober 2024



BUDI PRISULISTIYONO, S.Si., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700606 199703 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KESBANG DAN PMA

IKRAR SETYA DINATA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19771028 200604 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Boto Putih Nomor 7 Demaan, Jepara
Telepon (0291) 593813, Kode Pos 59419

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIA WARASITA, D, SE

Jabatan : JABATAN FUNGSIONAL (SUB KOORDINATOR KESBANG)

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IKRAR SETAYA DINATA, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PMA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KABID KESBANG DAN PMA

IKRAR SETYA DINATA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19771028 200604 1 018

PIHAK PERTAMA
JF SUBKOR KESBANG

YULIA WARASITA D, SE

Penata Tk. I

NIP. 19750728 199803 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
JABATAN FUNGSIONAL SUBKOR KESATUAN BANGSA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 laporan
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.085 orang
2	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33 orang
B	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	10 laporan
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715 orang
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	125 laporan

	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	
NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Rp. 435.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pembentukan Paskibraka		Rp. 85.000.0000.-	Sumber Anggaran dari APBD
B	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp. 350.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Rp. 735.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Rp. 220.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD
			Rp. 30.000.000.-	Sumber Anggaran dari APBD

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 485.000.000	Sumber Anggaran dari APBD

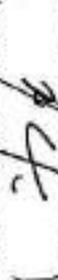
Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KABID KESBANG DAN PMA



IKRAR SETYA DINATA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19771028 200604 1 018

PIHAK PERTAMA
JF (SUBKOR KESBANG)



YULIA WARASITA, D, SE
Penata Tk. I

NIP. 19750728 199803 2 007